



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Labuhanbatu Selatan dapat diselesaikan, selamat dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Dokumen rencana strategis (RENSTRA) ini adalah menjadi Guidance dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi DPMPSTP dalam kurun 5 (Lima) Tahun yang akan datang, Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Labuhanbatu Selatan ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan- perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami butuhkan, Kami sangat berharap bahwa RENSTRA ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk dan memberi hidayah kepada kita untuk berkarya lebih baik lagi dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan penanaman modal. Aamiin.

**Kotapinang,                    September 2025**  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KABUPATEN LABUHANBATU**  
**SELATAN**

**ASMAMU HARAHAHAP, SKM., MM.**  
**PEMBINA (IV/a)**  
**NIP. 19791120 200801 2 002**

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**DAFTAR GAMBAR iii**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP .....</b>	<b>8</b>
2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP.....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP .....	8
2.1.2. Sumber Daya DPMPTSP.....	15
2.1.3. Sarana dan Prasarana. ....	19
2.1.4. Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	24
2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.2. Permasalahan dan Isu strategis DPMPTSP.....	26
2.2.1. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP.....	26
2.2.2. Peluang dan Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.2.3. Peluang Dan Tantangan di Dalam Penyusunan Rencana Strategis PD.....	27
2.2.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	28
2.2.5. Telaahan terhadap renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	38
2.2.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	41
2.2.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>52</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	52
3.2. Penetapan Renstra DPMPTSP.....	56
3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	57
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP .....</b>	<b>60</b>
4.1. Program dan Kegiatan .....	65
4.2. IKU DAN IKK.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan, sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu menyusun Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna mempermudah dan meningkatkan penanganan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yaitu dari proses pendaftaran sampai dengan diterbitkannya izin, sehingga terwujud Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Adil, Transparan dan Akuntabel.

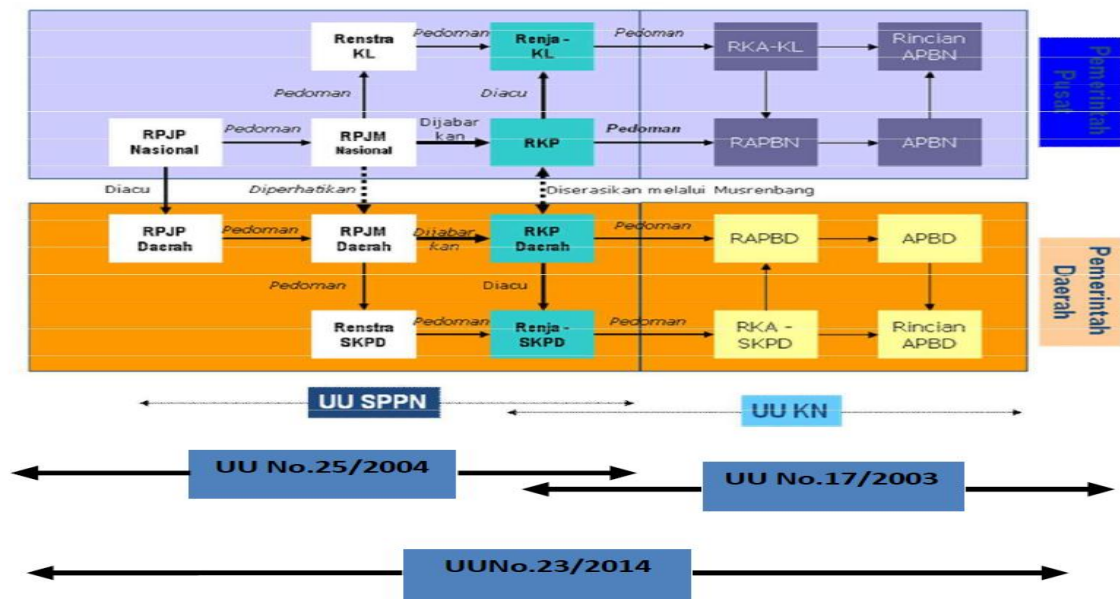
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencakup semua program dan kegiatan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029. Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra OPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Menurut Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra-PD disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan. Yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Renstra-PD adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya.

Sementara itu, penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan sejumlah dokumen perencanaan agar selaras, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, RPJPD Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dan RPJMD Kabupaten.

Keterkaitan antar dokumen Renstra-PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra-PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan dan alur proses perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Pada tingkat pusat, perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan durasi 20 tahun yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang bersifat jangka menengah (5 tahun), kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang bersifat jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), hingga Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang akhirnya bermuara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pada tingkat daerah alurnya paralel: RPJP Daerah → RPJM Daerah → Renstra SKPD → Renja SKPD → RKA SKPD → RAPBD → APBD. Hubungan antara pusat dan daerah

dijembatani oleh mekanisme musrenbang, di mana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional diserasikan dengan RKP Daerah. Skema ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan saling terkait secara hierarkis dan fungsional, dengan dokumen di tingkat yang lebih tinggi menjadi pedoman atau acuan bagi dokumen di bawahnya, sehingga tercapai sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 2 Seri D Nomor 02).
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

**Maksud** disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sebagai implementasi *Visi* dan *Misi* Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**Tujuan** disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sehingga tercipta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan perizinan dan non perizinan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu urusan di bidang penanaman modal dan perizinan;
5. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan investasi daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika RENSTRA PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, Adapun sistematika penulisan RENSTRA PD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP**

Menguraikan tentang Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Mitra perangkat daerah, permasalahan, Tantangan dan isu strategis perangkat daerah.

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DPMPTSP**

Menguraikan tentang Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Aceh Tenggara dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana startegis DPMPTSP Tahun 2025 – 2029.

#### **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DPMPTSP**

Menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan mengukur pencapaian target kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **BAB V : PENUTUP**

Menyimpulkan hasil perencanaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Labuhanbatu Selatan adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam mempercepat pengelolaan investasi dan perizinan di Labuhanbatu Selatan. DPMPTSP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan dapat berjalan dengan efisien, transparan dan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Promosi Investasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- b. Melaksanakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- c. Melaksanakan pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
- d. Menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- e. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- f. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- g. Menyelenggarakan pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan ;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Pelaksanaan, Informasi dan Promosi Penanaman Modal;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Pengaduan Pelayanan dan Pelaporan Layanan
  - a. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksan

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TANGGAL 7 April 2022



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttid,

H. EDIMIN

Secara rinci, uraian tugas dan fungsi dalam struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

**a. KEPALA DINAS**

Tugas Pokok

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, membantu kepala daerah (Bupati/Wali Kota), menyusun program kerja, menetapkan standar pelayanan, serta memastikan pelayanan perizinan berjalan efektif, efisien, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- b. Membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang terkait.
- d. Membina dan melaksanakan tugas kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan, dan informasi/pengaduan.
- e. Menyelenggarakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan indeks kepuasan masyarakat (IKM).
- f. Menjadi pengguna anggaran/barang dan bertanggungjawabkan keuangan dinas.
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati.

**b. SEKRETARIS**

Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, program serta pelaporan aset dilingkungan dinas ;

## Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan dinas;
- b. Penyelenggara administrasi umum di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggara urusan rumahtangga dinas; dan
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **c. SUB BAGIAN UMUM DAN PENATA USAHA KEUANGAN**

### Tugas Pokok

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

### Fungsi

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi pada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas di lingkungan badan;
- g. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- j. Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungan;
- l. Menyiapkan penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan penerima tamu;
- m. Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- n. Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala badan dan kegiatan badan serta mendokumentasikan berita;
- o. Menyiapkan penyelenggara jumpa pers dan hubungan masyarakat jika dibutuhkan;
- p. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- q. Menyelesaikan administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP, dan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. Memberi usulan dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah kepegawaian di lingkungan badan;
- s. Menilai kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kinerja;
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris baik melalui lisan maupun tulisan;
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

**d. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PELAKSANAAN, INFORMASI DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**

Tugas Pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Pelaksanaan, Informasi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana strategis, mengoordinasikan, memfasilitasi, serta memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan investasi, mulai dari pengembangan iklim investasi, promosi, hingga pengawasan kepatuhan investasi, dengan fokus pada data, informasi, dan sistem informasi penanaman modal untuk mendorong realisasi investasi daerah.

Fungsi

- a. Menyusun rencana strategis dan program kerja bidang penanaman modal;

- b. Mengkaji, menyusun, dan mengusulkan kebijakan serta regulasi terkait iklim investasi;
- c. Mengembangkan potensi dan peluang investasi daerah;
- d. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan realisasi pelaksanaan investasi;
- e. Melaksanakan pengawasan kepatuhan perusahaan penanam modal terhadap peraturan;
- f. Memberikan pembinaan, fasilitasi, dan penyelesaian permasalahan investasi;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- h. Menyusun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah;
- i. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi potensi investasi;

**e. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Tugas Pokok**

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan adalah mengelola seluruh proses pelayanan izin (usaha dan non-usaha) dan non-izin, meliputi perencanaan, verifikasi, validasi, administrasi, hingga penerbitan izin, serta melakukan pengawasan, koordinasi, evaluasi, dan penanganan pengaduan untuk memastikan pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan profesional sesuai standar yang ditetapkan.

1. Melaksanakan operasional pelayanan perizinan (usaha/non-usaha) dan non-perizinan;
2. Mengelola proses pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, dan validasi data permohonan izin;
3. Menyiapkan dan menerbitkan izin serta dokumen terkait;
4. Mengadministrasikan seluruh kegiatan pelayanan perizinan;
5. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memverifikasi permohonan izin;

6. Memberikan informasi, konsultasi, dan penyuluhan kepada masyarakat;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban;
8. Berkoordinasi dengan instansi terkait (vertikal/horizontal) untuk sinkronisasi layanan;

**f. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN**

Tugas Pokok

merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan teknis terkait pengaduan masyarakat dan pelayanan publik untuk memastikan layanan berjalan efektif, serta mengelola informasi dan meningkatkan kualitas layanan. Ini mencakup menerima pengaduan, menindaklanjuti, melakukan evaluasi, serta menyusun laporan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Fungsi

1. Merumuskan kebijakan strategis di bidang pengaduan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan kebijakan tersebut, termasuk menerima, menelaah, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, serta membina pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penanganan pengaduan;
5. Menyusun laporan berkala (bulanan/triwulanan) mengenai hasil tindak lanjut pengaduan dan kinerja layanan;
6. Mengelola sistem informasi dan penanganan pengaduan pelanggan/masyarakat;

**g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA**

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan**

**1. Susunan Kepegawaian**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ditahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki 42 orang pegawai terdiri dari :

- PNS : 17 orang
- PPDPK : 14 orang

- Dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

a.	Kepala Dinas	1	Orang
b.	Sekretariat	13	Orang
	- Sekertaris	1	Orang
	- Ka. Sub Bag Umum dan Penatausahaan Keuangan	1	Orang
	- Verifikator keuangan	1	Orang
	- Bendahara	1	Orang
	- Pengurus Barang	1	Orang
	- Pengola Kepegawaian	1	Orang
	- PPDPK	7	Orang
c.	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	5	Orang
	- Kepala Bidang	1	Orang
	- Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Orang
	- Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	1	Orang
	- PPDPK	2	Orang
d.	Bidang Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Penanaman Modal	4	Orang
	- Kepala Bidang	1	Orang
	- Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Orang
	- Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1	Orang
	- PPDPK	1	Orang
e.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	8	Orang
	- Kepala Bidang	-	Orang
	- Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	2	Orang
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	Orang
	- PPDPK	5	Orang

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan*

## 2. Komposisi Pegawai

### a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 Orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	4 Orang	Sekretaris & Ka. Bid
3.	Eselon IV	4 Orang	Ka.Subbag&Fungsional
4.	Jabatan Fungsional	6 Orang	
5.	Umum PPDPK	16 Orang	
	Jumlah	31 Orang	

### b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	SD	-	
2.		-	
3.	SLTP	-	
4.		1 Orang	
5.	SLTA	1 Orang	3 Orang PPDPK
6.	SARMUD /D3	5 Orang	1 Orang PNS
	STRATA 1	24 Orang	21 Orang PPDPK/PNS
	STRATA 2		
	Jumlah	31 Orang	

### c. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	6	
2.	Golongan III	8	
3.	Golongan II	1	
4.	Golongan I	0	
5.	Non Golongan	16	PPDPK
	Jumlah	31	

d. Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 2.4

NO	MASA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	0 tahun s/d 10 tahun	21 Orang	
2.	11 tahun s/d 15 tahun	9 Orang	
3.	16 tahun s/d 20 tahun	1 Orang	
4.	21 tahun s/d 25 tahun	0	
5.	26 tahun s/d 30 tahun	0	
6.	31 tahun s/d 40 tahun	0	
	Jumlah	31 Orang	

e. Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 2.5

NO	Jenis kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	17 Orang	
2.	Perempuan	14 Orang	
	Jumlah	31 Orang	

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan*

### **2.1.3 Sarana dan Prasarana(Sarpras)**

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

- Ruang Pelayanan:  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan yang berada di dalam dengan langit-langit atap yang tinggi ditopang dengan kolom yang kokoh dan luasnya hampir 1/3 luas lantai 1, menggambarkan pentingnya pelayanan publik, yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi dan dilengkapi dengan audio visual, menciptakan kenyamanan seperti berada di kantor Perbankan Swasta. Alunan musik yang bernuansa tenang mengiringi pemohon selama mengurus perizinan.

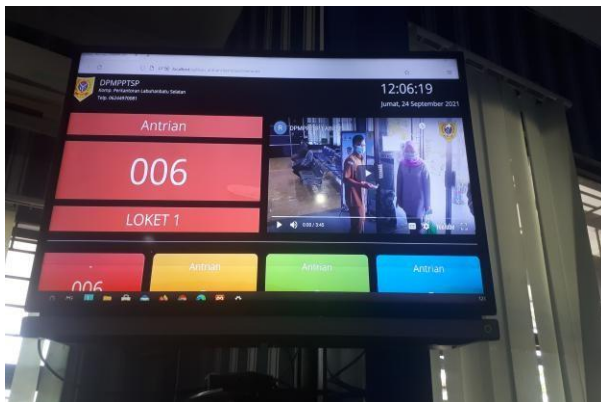
#### ***Ruang Pelayanan di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu***

- Locket *Costumer Service* dan Locket Pelayanan:  
Di locket *Costumer Service* dan locket pelayanan petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, berpakaian seragam rapi dan murah senyum dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



### ***Loket Costumer Service***

- Prasarana Layanan Pendukung Perizinan:
  - Layar Sentuh (*Touch Screen*)  
Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh (*Touch Screen*) yang mudah dioperasikan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui layar monitor yang disediakan serta panggilan urutan antrian dengan suara yang jelas.



### ***Layar Sentuh(Touch Screen)***

- Transparansi Pelayanan:  
Terbatasnya pemohon masuk kedalam *back office* untuk menghindari transaksi diluar ketentuan adalah bentuk transparansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- Prasarana lainnya yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memberikan pelayanan

perizinan dan non perizinan adalah:

- **Warung Promosi**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyediakan warung promosi, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk menerima informasi mengenai peluang investasi dan bahan bacaan mengenai potensi sumber daya mengenai penanaman modal.
- **Ruang Bermain Anak**  
Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan.
- **Ruang Laktasi**  
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.
- **Loket Pengaduan**  
Loket Pengaduan merupakan salah satu fasilitas yang dapat di gunakan oleh masyarakat jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- **Kotak Pengaduan**  
Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau sumber pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- **Aksesibilitas**  
Aksesibilitas disediakan untuk kemudahan penyandang *disabilitas*, atau manula yang menggunakan kursi roda
- **Musholla**  
Musholla salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- **Kamar Mandi / WC**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memiliki Kamar Mandi/ WC, yang berada di 2 (dua) sisi, sisi kiri dan kanan bangunan gedung.



***Ruang Bermain Anak***



***Warung Promosi***



***Loket Pengaduan***



*Kotak Pengaduan*



*Aksesibilitas*



*Kamar Mandi / WC*



*Mushola*

#### **2.1.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP**

Dalam periode 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Labuhanbatu selatan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang optimal melalui sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setiap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat dinas memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (RPJMD) 2025-2029.

Penyusunan indikator kinerja didasarkan pada pendekatan yang logis dan kausalitas (cascading), di mana pencapaian pada tingkat yang lebih rendah akan mendukung pencapaian tujuan strategis yang lebih besar. Indikator tersebut mencakup aspek-aspek penting, seperti peningkatan efisiensi pelayanan publik, penguatan iklim investasi, serta pengembangan daya saing daerah. Setiap indikator ini dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan visi jangka panjang Labuhanbatu Selatan.

Melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, kinerja DPMPTSP Labuhanbatu Selatan akan terus dipantau untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini juga akan memberikan dasar untuk memperbaiki atau mengoptimalkan strategi dan kebijakan yang ada, serta menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan Labuhanbatu Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada periode 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan dalam tabel berikut menjadi alat ukur utama

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan.

Tabel ini menjadi dasar akuntabilitas untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area perbaikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Labuhanbatu Selatan selama lima tahun ke depan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Labuhanbatu Selatan

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja DPMPTSP**  
**Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai dan Tugas fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	-	-	Jumlah Investor Berskala Nasional ( PMDN )	72	72	83	80	109	90
		-	-	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional ( PMDN x Rp 1.000.000 ) ( PMA x \$ 1.000 )	50.900,1/475,1	78.640,7/734,0	123.465,9/1.152,4	784.877.200.000	994.861.600.000	2.465.212.500.000
		-	-	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah ( % )	3%	3%	4%	14,4 %	11,6 %	18,9 %
2	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	-	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik/87	Baik/88	Baik/88	85,5	98,5	98,5

### **2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan dan pembangunan investasi daerah.

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP mencakup berbagai pemangku kepentingan, baik individu maupun kelembagaan, yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Pelaku Usaha (PMDN dan PMA) Pelaku usaha baik dalam negeri maupun asing yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan, fasilitasi investasi, serta dukungan dalam proses realisasi dan pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) UMKM merupakan kelompok strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. DPMPTSP memberikan dukungan berupa penyederhanaan perizinan berusaha, bimbingan teknis, serta fasilitasi kemudahan berusaha melalui sistem OSS dan pelayanan langsung.
3. Calon Investor Individu, badan usaha, maupun institusi yang berminat untuk menanamkan modal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelompok ini menjadi sasaran dalam program promosi investasi dan penyediaan informasi peluang usaha.
4. Instansi Pemerintah Daerah dan Vertikal OPD terkait dan instansi vertikal yang terlibat dalam proses teknis perizinan serta pembinaan investasi. DPMPTSP menjalin koordinasi intensif dalam rangka percepatan pelayanan dan efektivitas pengendalian perizinan.
5. Masyarakat Umum Warga negara yang mengakses layanan perizinan pribadi (seperti izin reklame, IMB/PBG rumah tinggal, izin usaha perorangan) atau yang memanfaatkan informasi publik terkait pelayanan investasi dan perizinan.
6. Asosiasi Usaha dan Kamar Dagang Kelompok ini menjadi mitra strategis dalam penjangkaran aspirasi pelaku usaha, penguatan komunikasi dua arah, dan penyampaian kebijakan kemudahan berusaha serta peluang investasi daerah.

Dengan memperjelas dan memperkuat pelayanan terhadap kelompok sasaran ini, DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkomitmen untuk meningkatkan

kualitas layanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, serta mendukung terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

### **Kemitraan DPMPTSP dalam Memberikan Pelayanan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, dan terintegrasi, DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Kemitraan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelayanan publik yang prima serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Adapun bentuk-bentuk kemitraan DPMPTSP meliputi:

1. Kemitraan Antar Perangkat Daerah DPMPTSP menjalin kerja sama teknis dengan OPD teknis terkait untuk proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan rekomendasi teknis.
2. Kemitraan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional, DPMPTSP bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, BPN, KPP Pratama, serta Kepolisian dan instansi vertikal lainnya untuk mendukung pelayanan satu pintu.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Labuhanbatu Selatan menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Permasalahan ini bersifat internal dan eksternal, yang memerlukan perhatian serius agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan mendukung peningkatan kinerja di masa mendatang.

Berikut beberapa permasalahan umum yang dihadapi DPMPTSP :

- a. Kurangnya promosi potensi daerah secara aktif dan terintegrasi;
- b. Iklim investasi yang belum optimal;
- c. Koordinasi yang belum optimal antara DPMPTSP dan OPD teknis terkait

rekomendasi perizinan;

d. Sarana dan prasarana pelayanan belum sepenuhnya mendukung pelayanan prima (baik fisik maupun digital);

e. Perlambatan / Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang disebabkan antara lain oleh menurunnya aktivitas sektor industri dan perdagangan sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB. Pada sisi lain aktivitas Usaha Mikro belum berkembang secara optimal dan kinerja penanaman modal yang belum dapat berkontribusi optimal terhadap penciptaan lapangan kerja;

f. Pemanfaatan teknologi belum maksimal, tanpa Mal Pelayanan Publik ;

g. Belum Tersedianya Infrastruktur Mal Pelayanan Publik, ketiadaan gedung atau lokasi khusus Mal Pelayanan Publik menjadi hambatan utama dalam integrasi layanan;

### **2.2.2 Isu Strategis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki mandat dalam mengelola penanaman modal dan pelayanan perizinan , DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan dihadapkan pada berbagai isu strategis yang menuntut perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan lima tahunan ke depan. Isu strategis ini merupakan hasil pemetaan terhadap permasalahan utama yang telah teridentifikasi, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, regional, dan lokal, termasuk hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.

#### **1. Isu KLHS yang Relevan**

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, isu yang relevan dengan peran DPMPTSP meliputi:

- Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB dan Per kapita.
- Pembinaan dan Pengendalian Dunia Usaha Penanaman Modal, Kerjasama dan SDA.
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan secara vertikal dengan dokumen perencanaan

nasional dan provinsi, khususnya Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029. Keterkaitan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi arah pembangunan, sinergi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan secara vertikal dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, khususnya Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029. Keterkaitan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi arah pembangunan, sinergi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

#### *1. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Investasi/BKPM*

Renstra Kementerian Investasi/BKPM menekankan beberapa agenda strategis, yaitu:

- percepatan implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA),
- peningkatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah,
- pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal untuk menarik penanaman modal,
- penguatan koordinasi pusat–daerah dalam fasilitasi investasi, serta
- reformasi birokrasi pelayanan publik berbasis digital.

Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarahkan strategi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang selaras, melalui program dan kegiatan seperti:

- Optimalisasi layanan perizinan melalui OSS-RBA dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem.
- Pelaksanaan promosi investasi daerah yang menonjolkan sektor unggulan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seperti agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata, sesuai dengan prioritas promosi investasi nasional.

- Penyusunan regulasi daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, baik berupa penyederhanaan prosedur maupun fasilitasi nonfiskal, untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi investasi.
- Penguatan koordinasi dengan BKPM dan lembaga terkait lainnya dalam rangka fasilitasi investasi strategis, termasuk pendampingan investor dan penyelesaian hambatan perizinan.

## 2. Keterkaitan dengan Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025–2029

Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan isu strategis pada:

- pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
- peningkatan iklim investasi yang kondusif,
- promosi sektor unggulan daerah,
- penyederhanaan dan digitalisasi layanan publik, serta
- tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Dalam konteks tersebut, Renstra DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan diarahkan untuk mendukung sasaran provinsi melalui strategi dan kegiatan berikut:

- Penguatan iklim investasi daerah dengan meningkatkan kualitas layanan perizinan yang transparan, cepat, dan berbasis teknologi informasi.
- Promosi penanaman modal berbasis potensi lokal yang sejalan dengan prioritas provinsi, seperti pengembangan kawasan industri, pariwisata, serta hilirisasi komoditas unggulan pertanian.
- Kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung investasi, khususnya pada penyediaan infrastruktur dasar dan kepastian tata ruang, yang menjadi syarat penting bagi realisasi investasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik, melalui survei kepuasan masyarakat (IKM) dan penerapan manajemen kinerja yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan provinsi yang transparan dan akuntabel.

## 3. Sinergi dan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Dengan adanya keterkaitan dan keselarasan ini, Renstra DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk:

- mendukung pencapaian sasaran RPJMN melalui Renstra BKPM,
- memperkuat kontribusi Kabupaten terhadap sasaran pembangunan Provinsi

Sumatera Utara 2025–2029,

- mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,

## **2. Isu Lingkungan Dinamis**

a. Global Konflik global seperti perang Ukraina-Rusia dan Palestina Israel berdampak pada ketidakstabilan rantai pasok dan menurunnya kelancaran ekspor-impor. Hal ini memberikan pengaruh terhadap daya saing investasi dan industri lokal, termasuk di Labuhanbatu Selatan.

b. Nasional Indonesia menghadapi peluang bonus demografi yang dapat mendorong pertumbuhan investasi jika diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Selain itu, pemanfaatan potensi ekonomi kelautan dan kawasan maritim nasional yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan investasi.

c. Regional belum Masih terdapat praktik pengelolaan investasi berbasis lahan yang sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Hal ini menuntut penguatan pengawasan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap rencana investasi di daerah.

## **3. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian di atas, isu strategis yang harus direspons oleh DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam periode perencanaan lima tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan promosi penanaman modal yang adaptif dan berbasis potensi unggulan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi.
2. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan investasi.
3. Peningkatan kapasitas SDM petugas pelayanan dan pendamping pelaku usaha di kecamatan, desa, dan kelurahan dalam memahami dan menyosialisasikan kebijakan penanaman modal.
4. Pembangunan Mall pelayanan publik secara terintegrasi melalui penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Kehadiran MPP dimaksudkan sebagai pusat integrasi layanan dari berbagai perangkat daerah

maupun instansi vertikal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepuasan masyarakat, serta meningkatkan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif.

Isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan DPMPTSP selama periode Renstra 2025–2029, guna mendukung pencapaian misi daerah dalam meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.6 Teknik Meyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang relevan dengan DPMPTSP	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan DPMPTSP			Isu strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pemberian kemudahan, fasilitasi dan insentif bagi penanaman modal ( RPJMD hal 170 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya promosi potensi daerah secara aktif dan terintegrasi</li> <li>• Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM pada DPMPTSP</li> <li>• Iklim investasi yang belum optimal</li> <li>• Belum Tersedianya Infrastruktur Mal Pelayanan Publik</li> <li>• Pemanfaatan teknologi belum</li> </ul>	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB dan Perkapita Pembinaan dan Pengendalian Dunia Usaha Penanaman Modal,	Konflik yang terjadi seperti Perang Ukraina Rusia, Palestina Israel, Atau kemiskinan ekstrim mempengaruhi rantai pasok global mempengaruhi industri manufacture dan ekspor import	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Kualitas Layanan Publik	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan Menjadi perhatian terhadap pengelolaan Investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penguatan Promosi potensi daerah secara aktif dan terintegrasi</li> <li>❖ Peningkatan Kualitas Sdm pada DPMPTSP</li> <li>❖ Pembangunan Mall Pelayanan Publik</li> <li>❖ Penguatan Koordinasi antar Opd Teknis</li> </ul>

	maksimal • Koordinasi yang belum optimal antara DPMPTSP dan OPD teknis terkait rekomendasi perizinan.	Kerjasama dan SDA.			lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.	
--	--	--------------------	--	--	--	--

### 2.2.3 Peluang dan Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam melaksanakan perannya sebagai salah satu perangkat daerah :

1. Penyederhanaan Regulasi, Adanya reformasi peraturan seperti UU Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission ( OSS ) telah menyederhanakan proses perizinan, mengurangi kompleksitas dan mempersingkat waktu pemrosesan, sehingga membuka peluang investasi lebih besar;
2. Digitalisasi Pelayanan, Pengembangan sistem perizinan online ( OSS ) meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan;
3. Potensi Investasi Berlimpah, Labuhanbatu Selatan memiliki potensi daya tarik investasi yang besar, meliputi sumber daya alam melimpah, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil ;
4. Semakin kritis dan proaktif peran masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
6. Perkembangan teknologi informasi.

Berikut merupakan tantangan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam melaksanakan perannya sebagai salah satu perangkat daerah:

1. Kompleksitas Birokrasi, meskipun ada perbaikan tumpang tindih kewenangan masih terjadi;
2. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM;
3. Ketidakpastian Hukum;
4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi;

#### **2.2.4 Peluang Dan Tantangan di Dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsinya membantu Bupati di dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Berikut merupakan tantangan di dalam menyusun renstra perangkat daerah:

1. Efisiensi sumber daya manusia perangkat daerah belum diimbangi dengan optimalnya penggunaan teknologi informasi.
2. Terjadinya perubahan situasi dan kondisi yang terlalu cepat, termasuk perubahan mengenai aturan teknis di dalam peraturan perundang-undangan yang begitu cepat, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan adaptasi pada perangkat daerah di dalam menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

#### **2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Tabel 2.10  
Rencana Sistem Pusat Kegiatan  
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

<b>NO</b>	<b>PUSAT KEGIATAN</b>	<b>HIRARKI FUNGSI</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>
	Kotapinang (Kec. Kotapinang)	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• Pusat perdagangan dan jasa regional;</li> <li>• Pusat jasa transportasi intra regional;</li> <li>• Industri pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumahan dan permukiman;</li> <li>• Pusat pelayanan pendidikan, kesehatan;</li> <li>• Pariwisata.</li> </ul>
	Tanjung Medan (Kec. Kampung Rakyat)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan kecamatan</li> <li>• Pengelolaan dan pengolahan hasil Pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;</li> <li>• Perdagangan dan jasa lokal;</li> <li>• Pelayanan pendidikan dan kesehatan;</li> <li>• Perumahan dan permukiman.</li> </ul>
	Cikampak (Kec. Torgamba)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>• Pusat jasa transportasi intra regional/kota transit;</li> <li>• Perdagangan dan jasa lokal;</li> <li>• pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;</li> <li>• Pelayanan pendidikan menengah dan kesehatan;</li> <li>• Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam)</li> <li>• Pariwisata;</li> <li>• Perumahan dan permukiman;</li> <li>• Kehutanan.</li> </ul>
	Langga Payung (Kec. Sungai Kanan)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>• Pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</li> <li>• Pusat jasa transportasi regional/kota transit;</li> <li>• Pelayanan pendidikan dan kesehatan;</li> <li>• Perumahan dan permukiman;</li> <li>• Kawasan lindung dan kehutanan.</li> </ul>
	Aek Goti (Kec. Silangkitang)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>• Pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan</li> </ul>

			dan perikanan; • Perdagangan dan jasa lokal; • Pelayanan pendidikan dan kesehatan; • Perumahan dan permukiman.
	Simatahari (Kec. Kotapinang)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	• Pertanian tanaman pangan; • Perkebunan; • Peternakan; • Permukiman pedesaan.
	Teluk Panji (Kec. Kampung Rakyat)	L	• Pertanian tanaman pangan; • Perkebunan; • Peternakan; • Permukiman pedesaan.
	Pinang Damai (Kec. Torgamba)	L	• Pertanian tanaman pangan; • Perkebunan; • Peternakan; • Permukiman pedesaan.
	Hutagodang (Kec. Sungai Kanan)	L	• Pertanian tanaman pangan; • Perkebunan; • Peternakan; • Permukiman pedesaan.
	Mandalasena (Kec. Silangkitang)	L	• Pertanian tanaman pangan; • Perkebunan; • Peternakan; • Permukiman pedesaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;

3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam Wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah Kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada Wilayah Kabupaten.

Tabel 2.11  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan
1	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>		
1.1	Kawasan Lindung	Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Hutan Lindung Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi hutan lindung Pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas. Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di kawasan hutan	Kecamatan Sungai Kanan

		lindung maupun kawasan resapan air di luar hutan lindung.	
1.2	Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Resapan Air	Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Torgamba, dan Kecamatan Kotapinang.
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat		
1.3.1	Sempadan Sungai	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Sempadan Sungai	Sungai Barumon. Selain sungai Barumon terdapat sungai-sungai kecil lainnya seperti Sungai Kanan, Aek Raso, Aek Kabar, Aek Tasik dan sebagainya.
1.3.2	Kawasan Sekitar Danau	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Sekitar Danau Penataan Kawasan Sekitar Danau sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	Danau Pagaran Padang yang terdapat di Kecamatan Torgamba.
1.3.3	RTH Kawasan Perkotaan	Penataan Kawasan ruang terbuka hijau	RTH publik dan privat di kawasan perkotaan Kotapinang, Cikampak, Langgapayung, Aek Goti dan Tanjung Medan
1.4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Suaka Alam Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam melalui Reboisasi dengan Jenis-Jenis Vegetasi Endemik Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak Pengadaan bibit dan penanaman pada kawasan prioritas	Taman Wisata Holiday Resort, Kec. Torgamba, taman wisata Pemandian Alam Pandayangan Indah di Kec. Silangkitang, Kawasan Wisata Danau Pagaran Padang di Kec. Torgamba, Pantai Lumpatan dan Pantai Keceper di Kec. Sungai Kanan dan Danau Biramata di Kec. Kotapinang, Taman Wisata Water Park dan Bumi Perkemahan di Kecamatan Torgamba, Taman Wisata Simatahari Indah dan Taman Wisata Sandrina di Kecamatan Sungai Kanan dan Istana Kota Bahran di Kotapinang.
1.5	Kawasan Rawan Bencana		
1.5.1	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan

		Sosialisasi daerah rawan longsor (kemiringan >40%)	Torgamba.
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya,	
		Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah hutan lindung,	
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor	
		Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor	
		Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah	
1.5.2	Kawasan Rawan Banjir	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Rawan Banjir	Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kotapinang.
		Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural	
		Rehabilitasi dan Reboisasi kawasan hulu dan DAS	
		Pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir)	
		Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensi terdampak).	
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>		
2.1	Kawasan Hutan Produksi		
2.1.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas	Pengembangan Hasil Hutan Produksi	Kecamatan Sungai Kanan
2.1.2	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap	Pengembangan Hasil Hutan Produksi	Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba, dan Kecamatan Kotapinang
2.1.3	Kawasan Hutan Suaka Alam	Peningkatan Hasil Hutan Produksi	Kecamatan torgamba
2.2	Kawasan Peruntukan Pertanian		
2.2.1	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Pengembangan Lahan Sawah	Kecamatan Sungai Kanan Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan Desa Sampean, Kecamatan Kotapinang Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang Desa Pasir Tuntung/ Desa
		Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan	
		Pengadaan Alat dan Mesin Penunjang Kegiatan Pertanian	
		Pengembangan Irigasi Pedesaan	

		Guna Menjamin Ketersediaan Air	Hadundung, Desa Bunut Kecamatan Torgamba, Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat
2.2.2	Kawasan Pertanian Hortikultura	Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan	Kecamatan Torgamba, Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai.
		Pengadaan Alat dan Mesin Penunjang Kegiatan Pertanian	
2.2.3	Kawasan Peternakan	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kecamatan Torgamba, Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai.
		Pengembangan fasilitas dan infrastruktur peternakan.	
		Menggalakan program penggunaan ternak bibit unggul	
		Pemberian penguatan modal bagi usaha peternakan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha peternakan.	
2.2.4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Intensifikasi lahan, melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.	Kecamatan Torgamba, Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai.
		Program peremajaan dan rehabilitasi tamanan perkebunan sawit.	
2.3	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan jalan termasuk jalan usaha tani, irigasi, dan agro industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perikanan	Kecamatan Torgamba, Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai.
		Pemberian penguatan modal bagi usaha perikanan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perikanan	
		Menggalakan program penggunaan bibit ikan yang unggul	
		Memperluas wilayah pemasaran produksi perikanan, baik lokal maupun pasar ekspor	
		Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha perikanan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau)	
		Pengembangan sumberdaya manusia (petani dan aparatur	

		pemerintah) dan kelembagaan agribisnis	
2.4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi minyak dan gas bumi, mineral dan Batubara	Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kotapinang, dan Kecamatan Silangkitang.
2.5	Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan industri mendukung struktur ruang/hirarki pelayanan	Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kotapinang, dan Kecamatan Silangkitang.
2.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Peningkatan apresiasi budaya daerah	Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kotapinang, dan Kecamatan Silangkitang.
		Sosialisasi peningkatkan kesadaran Masyarakat	
2.7	Kawasan Peruntukan Permukiman	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Permukiman	Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kotapinang, dan Kecamatan Silangkitang.
2.8	Kawasan Peruntukan Lainnya	kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Kotapinang

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, Penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan merupakan satu bagian yang terpenting, karena menentukan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025 – 2029, Visi Pembangunan yang akan di capai Adalah “**Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern**”

Adapun makna dari visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD

**Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029, sebagai berikut:**

- 1. Maju wilayahnya** ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, memiliki SDM yang maju, memiliki ekonomi yang berkelanjutan, dan tentunya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- 2. Orientasinya pelayanan prima** ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi, serta digitalisasi.
- 3. Dekat dengan warganya** ditandai dengan penguatan budaya dan kearifan lokal yang mengedepankan gotong royong.
- 4. Ekonominya kuat** ditandai dengan pertumbuhan perekonomian yang meningkat dari sektor-sektor unggulan daerah.
- 5. Reformasi birokrasinya** berdampak ditandai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik dan birokrasinya berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah.
- 6. Nyaman untuk semua** ditandai dengan wilayah yang aman dari kejahatan dan memiliki lingkungan yang lestari sehingga dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat.

Adapun untuk mencapai Visi seperti tersebut diatas, maka dihasilkan 8 Misi Pembangunan dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.

2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat.
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tenram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas.
5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
6. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
7. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata.
8. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadilang, Bermartabat.

Dari 8 Misi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mendorong tercapainya misi 3.

Untuk Misi ke 3 yaitu Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkewajiban membantu pencapaian Misi tersebut.

Sehingga kemudian dirumuskanlah Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Iklim investasi yang kompetitif

Indikator Tujuan : Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota;

Adapun untuk mencapai Tujuan tersebut, ditetapkanlah Sasaran sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya realisasi investasi daerah;

Indikator sasaran : Jumlah investor berskala nasional;



---

Sasaran II : Meningkatnya Transparansi dan responsibilitas pelayanan publik; Indikator  
Sasaran : Indeks kepuasan masyarakat;

Adapun Tabel lengkap dari Tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2029  
adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>											
	TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	5	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya Realisasi Investasi daerah	Investor berskala nasional (Investor)	83	90	96	101	106	110	115	
			Jumlah Investasi (triliun rupiah)	3.447.288.045.792	1.016.518.000.000	1.067.343.900.000	1.120.711.095.000	1.176.746.649.750	1.235.583.982.238	1.297.363.181.349	
		Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten (Persentase)	83	95,50	95,55	95,60	95,65	95,70	95,75	

### **3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berperan strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. Penetapan tujuan dan sasaran strategis disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan pembagian kewenangan, serta mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, hingga dukungan infrastruktur sistem pelayanan. Tujuan dan sasaran strategis ini disusun secara terukur dan terarah, serta dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap sasaran dirumuskan sebagai intermediate outcome, yaitu hasil antara yang mencerminkan kontribusi nyata DPMPTSP terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Seluruh pernyataan sasaran disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

#### **Tujuan 1 :**

##### **Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif**

Tujuan ini menggambarkan arah jangka menengah yang hendak dicapai DPMPTSP sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan investasi daerah yang sehat, inklusif, dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam NSPK sektor penanaman modal, implementasi OSS Berbasis Risiko, serta penguatan fasilitasi promosi investasi.

##### **Sasaran : Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi Daerah**

Sasaran ini merupakan bentuk konkret dari kontribusi DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif, baik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai intermediate outcome, sasaran ini mencerminkan hasil antara dari pelaksanaan peran strategis DPMPTSP yang selaras dengan NSPK bidang penanaman modal yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Penetapan sasaran ini mempertimbangkan kondisi aktual perangkat daerah, termasuk kapasitas pengelolaan pelayanan perizinan berusaha, sistem pelaporan investasi, dan dukungan promosi investasi daerah.

Sasaran ini dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diukur secara kuantitatif dalam jangka waktu lima tahun.

### **3.3 Strategi DPMPTSP Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029**

Strategi pembangunan DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu dirumuskan sebagai rencana tindakan komprehensif yang mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama periode lima tahun secara efektif, efisien, dan adaptif.

**Tujuan : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif**

**Sasaran : Meningkatnya Realisasi nilai investasi Daerah**

**Strategi :**

1. Penguatan pemanfaatan sistem perizinan terintegrasi OSS-RBA, penyederhanaan prosedur perizinan, penerapan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Pengembangan materi promosi investasi berbasis data sektoral dan potensi unggulan daerah, peningkatan penggunaan media digital dan event investasi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan promosi dan menarik minat investor. Penyusunan dan penyebaran daftar peluang investasi (DPI) berbasis potensi unggulan daerah secara berkala.

3. Penyusunan regulasi daerah yang memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, fasilitasi penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta penerapan kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung kemudahan berusaha, termasuk percepatan penyediaan infrastruktur pendukung investasi.

4. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum perangkat daerah, integrasi data dan sistem pelayanan antar instansi, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait untuk menciptakan pelayanan investasi yang terpadu dan efektif.

### **3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan ini ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Arah kebijakan perangkat daerah diarahkan untuk menjawab tantangan strategis dalam pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, melalui penguatan sistem pelayanan, promosi, pengawasan, serta pemberian insentif yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan kebutuhan pelaku usaha. Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029 salah satunya difokuskan pada penguatan tata kelola layanan perizinan dan non-perizinan berbasis integrasi. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menargetkan pembangunan sekaligus operasionalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2026. MPP dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu lintas sektor yang mengintegrasikan layanan dari berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal. Kehadiran MPP diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat minat investasi, serta memberikan kepastian dan kualitas layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

### **3.5 Penahapan Renstra DPMPTSP**

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) umumnya meliputi analisis awal, perumusan tujuan dan sasaran, pengembangan strategi dan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta implementasi dan evaluasi. Proses ini biasanya dilakukan secara terstruktur untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan jangka panjang antara lain :

**Tabel 3.2. Penahapan Renstra DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
-Penyusunan kebijakan yang mendukung investasi (RUPM)	Penyusunan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah	Peningkatan strategi promosi penanaman modal	Monitoring dan evaluasi potensi daerah	Pelaksanaan promosi penanaman modal dan evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan untuk periode selanjutnya
-Promosi penanaman modal secara online dan offline	-Monitoring dan evaluasi potensi daerah	Promosi penanaman modal	Pembaharuan data potensi	
Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas pelayanan publik (Mal Pelayanan Publik)	Mengkoordinir Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	-Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat dibuat secara digitalisasi- Pelaksanaan pengaduan, layanan konsultasi masyarakat secara digitalisasi	Evaluasi sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat Dan Pelaksanaan Pengaduan, Dan Layanan Konsultasi
Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Mengidentifikasi permasalahan pelaku usaha yang bukan menjadi kewenangan daerah dan berkoordinasi ke provinsi/pusat	-Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

*Sumber: DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2025 (diolah)*

Dalam rangka menentukan arah kebijakan DPMPTSP, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator

sasaran pada setiap misi sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Adapun Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Operasionalisasi Nspk	Arah Kebijakan Rpjmd	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Penguatan Transformasi Ekonomi Yang Diwujudkan Untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Intensifikasi Hilirisasi produk unggulan daerah berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah,memperkuat daya saing ekonomi lokal;  Mengoptimalkan daya tarik investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata melalui kemitraan pemerintah-swasta dan promosi daerah yang terintegrasi;	Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS RBA dan percepatan pelayanan  Penyusunan dan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal berbasis potensi daerah  Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan lembaga dalam pelayanan penanaman modal	

Arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penentuan strategi, penahapan, dan rencana aksi tahunan DPMPTSP, sekaligus menjadi kerangka untuk pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyesuaian kebijakan secara berkala guna mencapai hasil pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam proses penyusunan rencana strategis (Renstra), diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program kerja dalam 5 tahun kedepan yang nantinya bertujuan mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **IV.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur untuk lima tahun mendatang terdiri dari :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Sub kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - Subkegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
  - Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
  - Subkegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah
  - Subkegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
  - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Subkegiatan Pengadaan Mebel
  - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 

**3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

**4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

**5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
- Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal

**6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

### Terintegrasi secara Elektronik

Di dalam penyusunan tujuan, sasaran, outcome, dan output hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya telah disesuaikan dengan dokumen RJPMD.

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya sebagai indikasi pendanaan DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.176.174.213,00		10.093.791.634,00		11.103.170.798,00		12.213.487.878,00		13.434.836.665,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.554.293.150,00		8.309.722.465,00		9.140.694.712,00		10.054.764.183,00		11.060.240.601,00	
PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	7.554.293.150,00	100	8.309.722.465,00	100	9.140.694.712,00	100	10.054.764.183,00	100	11.060.240.601,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					520.000.000,00		572.000.000,00		629.200.000,00		692.120.000,00		761.332.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	10,41	5	5	520.000.000,00	5	572.000.000,00	5	629.200.000,00	5	692.120.000,00	5	761.332.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	3	5	5	400.000.000,00	5	440.000.000,00	5	484.000.000,00	5	532.400.000,00	5	585.640.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					261.609.158,00		287.770.074,00		316.547.081,00		348.201.789,00		383.021.968,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	90	91	92	261.609.158,00	92	287.770.074,00	93	316.547.081,00	93	348.201.789,00	95	383.021.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					404.366.592,00		444.803.251,00		489.283.576,00		538.211.934,00		592.033.127,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	50	50	50	404.366.592,00	70	444.803.251,00	80	489.283.576,00	90	538.211.934,00	100	592.033.127,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					35.905.313,00		39.495.844,00		43.445.429,00		47.789.972,00		52.568.969,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	50	50	50	35.905.313,00	70	39.495.844,00	80	43.445.429,00	90	47.789.972,00	100	52.568.969,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					9176174213,00		10093791634,00		11103170798,00		12213487878,00		13434836665,00	

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>							
	TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
		Meningkatnya Realisasi Investasi daerah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0004 - Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
				Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tertelaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi			Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan pada DPMPSTP Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.176.174.213,00		10.093.791.634,00		11.103.170.798,00		12.213.487.878,00		13.434.836.665,00				
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.554.293.150,00		8.309.722.465,00		9.140.694.712,00		10.054.764.183,00		11.060.240.601,00				
PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor (%)	100	100	100	7.554.293.150,00	100	8.309.722.465,00	100	9.140.694.712,00	100	10.054.764.183,00	100	11.060.240.601,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.696.221,00		7.365.843,00		8.102.427,00		8.912.671,00		9.803.937,00				
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1	6.696.221,00	1	7.365.843,00	1	8.102.427,00	1	8.912.671,00	1	9.803.937,00				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	2		2		2		2							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	4	4		4		4		4							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1		1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1		1		1		1							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		1		1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	1		1		1		1							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.070.245,00		1.177.270,00		1.294.996,00		1.424.496,00		1.566.946,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	1	1.070.245,00	1	1.177.270,00	1	1.294.996,00	1	1.424.496,00	1	1.566.946,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.069.604,00		1.176.564,00		1.294.221,00		1.423.643,00		1.566.007,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1	1.069.604,00	1	1.176.564,00	1	1.294.221,00	1	1.423.643,00	1	1.566.007,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN , Kotapinang	
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					982.213,00		1.080.434,00		1.188.478,00		1.307.326,00		1.438.058,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1	982.213,00	1	1.080.434,00	1	1.188.478,00	1	1.307.326,00	1	1.438.058,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					874.357,00		961.793,00		1.057.972,00		1.163.769,00		1.280.146,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1	874.357,00	1	961.793,00	1	1.057.972,00	1	1.163.769,00	1	1.280.146,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					856.492,00		942.141,00		1.036.355,00		1.139.991,00		1.253.990,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1	856.492,00	1	942.141,00	1	1.036.355,00	1	1.139.991,00	1	1.253.990,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					758.453,00		834.298,00		917.728,00		1.009.501,00		1.110.451,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	4	4	758.453,00	4	834.298,00	4	917.728,00	4	1.009.501,00	4	1.110.451,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.084.857,00		1.193.343,00		1.312.677,00		1.443.945,00		1.588.339,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	2	1.084.857,00	2	1.193.343,00	2	1.312.677,00	2	1.443.945,00	2	1.588.339,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.830.922.529,00		4.214.014.782,00		4.635.416.261,00		5.098.957.885,00		5.608.853.674,00				
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	2	2	3.830.922.529,00	2	4.214.014.782,00	2	4.635.416.261,00	2	5.098.957.885,00	2	5.608.853.674,00				
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	23	23		28		30		32		33					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	4	4		4		4		4		4					
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.658.891.627,00		4.024.780.790,00		4.427.258.869,00		4.869.984.756,00		5.356.983.231,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	23	23	3.658.891.627,00	28	4.024.780.790,00	30	4.427.258.869,00	32	4.869.984.756,00	33	5.356.983.231,00				
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					90.013.541,00		99.014.895,00		108.916.385,00		119.808.023,00		131.788.825,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	12	12	90.013.541,00	12	99.014.895,00	12	108.916.385,00	12	119.808.023,00	12	131.788.825,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	2	2	73.287.677,00	2	80.616.445,00	2	88.678.089,00	2	97.545.898,00	2	107.300.488,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	4	4	1.418.856,00	4	1.560.742,00	4	1.716.816,00	4	1.888.497,00	4	2.077.347,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	2	1.807.904,00	2	1.988.694,00	2	2.187.564,00	2	2.406.320,00	2	2.646.952,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	2	2.993.711,00	2	3.293.082,00	2	3.622.390,00	2	3.984.629,00	2	4.383.092,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	12	1.522.514,00	12	1.674.765,00	12	1.842.242,00	12	2.026.466,00	12	2.229.113,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	2	2	986.699,00	2	1.085.369,00	2	1.193.906,00	2	1.313.296,00	2	1.444.626,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.166.634,00		7.883.298,00		8.671.627,00		9.538.790,00		10.492.668,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN															
			2025		2026		2027		2028		2029		2030																		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU																		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)															
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	2	7.166.634,00	2	7.883.298,00	2	8.671.627,00	2	9.538.790,00	2	10.492.668,00																		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1																			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4	4		4		4		4		4																			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1																			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	2		2		2		2		2																			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	2		2		2		2		2																			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1																			
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.088.706,00		1.197.577,00		1.317.334,00		1.449.068,00		1.593.974,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN																
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1	1.088.706,00	1	1.197.577,00	1	1.317.334,00	1	1.449.068,00	1	1.593.974,00																		
2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					958.327,00		1.054.160,00		1.159.576,00		1.275.533,00		1.403.087,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN																
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4	4	958.327,00	4	1.054.160,00	4	1.159.576,00	4	1.275.533,00	4	1.403.087,00																		
2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1.054.284,00		1.159.712,00		1.275.684,00		1.403.252,00		1.543.577,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN																
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	2	1.054.284,00	2	1.159.712,00	2	1.275.684,00	2	1.403.252,00	2	1.543.577,00																		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1.128.053,00		1.240.858,00		1.364.944,00		1.501.439,00		1.651.582,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1	1.128.053,00	1	1.240.858,00	1	1.364.944,00	1	1.501.439,00	1	1.651.582,00				
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					857.710,00		943.481,00		1.037.829,00		1.141.612,00		1.255.773,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	2	857.710,00	2	943.481,00	2	1.037.829,00	2	1.141.612,00	2	1.255.773,00				
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.128.258,00		1.241.084,00		1.365.192,00		1.501.711,00		1.651.883,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	2	1.128.258,00	2	1.241.084,00	2	1.365.192,00	2	1.501.711,00	2	1.651.883,00				
2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					951.296,00		1.046.426,00		1.151.068,00		1.266.175,00		1.392.792,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1	951.296,00	1	1.046.426,00	1	1.151.068,00	1	1.266.175,00	1	1.392.792,00				
2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					112.191.284,00		123.410.412,00		135.751.454,00		149.326.599,00		164.259.258,00				
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	2	112.191.284,00	2	123.410.412,00	2	135.751.454,00	2	149.326.599,00	2	164.259.258,00				
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	5	5		5		5									
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	1		1		1									
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	4	4		4		4									
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	2		2		2									
2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					1.090.592,00		1.199.651,00		1.319.616,00		1.451.578,00		1.596.736,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	1	1.090.592,00	1	1.199.651,00	1	1.319.616,00	1	1.451.578,00	1	1.596.736,00				
2.18.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	5	5	70.000.000,00	5	77.000.000,00	5	84.700.000,00	5	93.170.000,00	5	102.487.000,00				
2.18.01.2.04.0004 - Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					36.498.581,00		40.148.439,00		44.163.283,00		48.579.611,00		53.437.572,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	2	36.498.581,00	2	40.148.439,00	2	44.163.283,00	2	48.579.611,00	2	53.437.572,00				
2.18.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah					2.072.737,00		2.280.011,00		2.508.012,00		2.758.813,00		3.034.694,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	4	4	2.072.737,00	4	2.280.011,00	4	2.508.012,00	4	2.758.813,00	4	3.034.694,00				
2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					2.529.374,00		2.782.311,00		3.060.543,00		3.366.597,00		3.703.256,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	2	2.529.374,00	2	2.782.311,00	2	3.060.543,00	2	3.366.597,00	2	3.703.256,00				
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					433.287.421,00		476.616.163,00		524.277.779,00		576.705.557,00		634.376.113,00				
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	4	433.287.421,00	4	476.616.163,00	4	524.277.779,00	4	576.705.557,00	4	634.376.113,00				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	5		5		5		5		5					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	100	100		100		100		100		100					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	37	37		37		37		37		37					
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					103.287.421,00		113.616.163,00		124.977.779,00		137.475.557,00		151.223.113,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	37	37	103.287.421,00	37	113.616.163,00	37	124.977.779,00	37	137.475.557,00	37	151.223.113,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN					
			2025		2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU								
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		117.128.000,00								
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	4	80.000.000,00	4	88.000.000,00	4	96.800.000,00	4	106.480.000,00	4	117.128.000,00								
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00								
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	100	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	146.410.000,00								
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00								
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	5	150.000.000,00	5	165.000.000,00	5	181.500.000,00	5	199.650.000,00	5	219.615.000,00								
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					659.064.194,00		724.970.614,00		797.467.675,00		877.214.442,00		964.935.887,00								
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	12	659.064.194,00	12	724.970.614,00	12	797.467.675,00	12	877.214.442,00	12	964.935.887,00								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12		12	12	12	12				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12		12	12	12	12				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	4	4		4		4		4		4		4	4	4	4				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12		12	12	12	12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12	12	12	12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	12		12		12		12		12		12	12	12	12				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	12	12		12		12		12		12		12	12	12	12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	2	2		2		2		2		2					
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.035.089,00		22.038.598,00		24.242.458,00		26.666.703,00		29.333.374,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	12	20.035.089,00	12	22.038.598,00	12	24.242.458,00	12	26.666.703,00	12	29.333.374,00				
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					117.450.000,00		129.195.000,00		142.114.500,00		156.325.950,00		171.958.545,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12	117.450.000,00	12	129.195.000,00	12	142.114.500,00	12	156.325.950,00	12	171.958.545,00				
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00	12	21.961.500,00				
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.967.486,00		23.064.235,00		25.370.658,00		27.907.724,00		30.698.496,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	12	20.967.486,00	12	23.064.235,00	12	25.370.658,00	12	27.907.724,00	12	30.698.496,00				
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					45.678.082,00		50.245.890,00		55.270.479,00		60.797.527,00		66.877.280,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	12	12	45.678.082,00	12	50.245.890,00	12	55.270.479,00	12	60.797.527,00	12	66.877.280,00				
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					125.675.436,00		138.242.980,00		152.067.278,00		167.274.005,00		184.001.406,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	2	2	125.675.436,00	2	138.242.980,00	2	152.067.278,00	2	167.274.005,00	2	184.001.406,00				
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					13.579.069,00		14.936.976,00		16.430.673,00		18.073.741,00		19.881.115,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	12	13.579.069,00	12	14.936.976,00	12	16.430.673,00	12	18.073.741,00	12	19.881.115,00				
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					280.450.000,00		308.495.000,00		339.344.500,00		373.278.950,00		410.606.845,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	280.450.000,00	12	308.495.000,00	12	339.344.500,00	12	373.278.950,00	12	410.606.845,00				
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.229.032,00		22.251.935,00		24.477.129,00		26.924.842,00		29.617.326,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	4	4	20.229.032,00	4	22.251.935,00	4	24.477.129,00	4	26.924.842,00	4	29.617.326,00				
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.587.093.742,00		1.745.803.117,00		1.920.383.428,00		2.112.421.770,00		2.323.663.948,00				
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	1.587.093.742,00	1	1.745.803.117,00	1	1.920.383.428,00	1	2.112.421.770,00	1	2.323.663.948,00				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	25	25		25		25		25		25					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	10		10		10		10		10					
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					825.436.987,00		907.980.686,00		998.778.754,00		1.098.656.630,00		1.208.522.293,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1	825.436.987,00	1	907.980.686,00	1	998.778.754,00	1	1.098.656.630,00	1	1.208.522.293,00				
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					85.678.098,00		94.245.908,00		103.670.499,00		114.037.548,00		125.441.303,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	10	85.678.098,00	10	94.245.908,00	10	103.670.499,00	10	114.037.548,00	10	125.441.303,00				
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					175.978.657,00		193.576.523,00		212.934.175,00		234.227.592,00		257.650.352,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	25	25	175.978.657,00	25	193.576.523,00	25	212.934.175,00	25	234.227.592,00	25	257.650.352,00				
2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	3	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	121.000.000,00	3	133.100.000,00	3	146.410.000,00				
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00				
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					477.223.169,00		524.945.486,00		577.440.035,00		635.184.038,00		698.702.442,00				
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	477.223.169,00	12	524.945.486,00	12	577.440.035,00	12	635.184.038,00	12	698.702.442,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	4		4		4		4							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12							
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					16.655.275,00		18.320.803,00		20.152.883,00		22.168.171,00		24.384.988,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	4	16.655.275,00	4	18.320.803,00	4	20.152.883,00	4	22.168.171,00	4	24.384.988,00				
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					110.567.894,00		121.624.683,00		133.787.152,00		147.165.867,00		161.882.454,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	110.567.894,00	12	121.624.683,00	12	133.787.152,00	12	147.165.867,00	12	161.882.454,00				
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					350.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		465.850.000,00		512.435.000,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	350.000.000,00	12	385.000.000,00	12	423.500.000,00	12	465.850.000,00	12	512.435.000,00				
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					440.647.956,00		484.712.750,00		533.184.026,00		586.502.431,00		645.152.674,00				
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	5	440.647.956,00	5	484.712.750,00	5	533.184.026,00	5	586.502.431,00	5	645.152.674,00				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	20	20		20		20		20							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		9	9		10		12		13							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1					
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					155.647.956,00		171.212.752,00		188.334.027,00		207.167.429,00		227.884.172,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		9	9	155.647.956,00	10	171.212.752,00	12	188.334.027,00	13	207.167.429,00	15	227.884.172,00				
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	20	20	100.000.000,00	20	110.000.000,00	20	121.000.000,00	20	133.100.000,00	20	146.410.000,00				
2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	5	35.000.000,00	5	38.500.000,00	5	42.350.000,00	5	46.585.000,00	5	51.243.500,00				
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					150.000.000,00		164.999.998,00		181.499.999,00		199.650.002,00		219.615.002,00			KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	150.000.000,00	1	164.999.998,00	1	181.499.999,00	1	199.650.002,00	1	219.615.002,00				
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					520.000.000,00		572.000.000,00		629.200.000,00		692.120.000,00		761.332.000,00				
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	10,41	5	5	520.000.000,00	5	572.000.000,00	5	629.200.000,00	5	692.120.000,00	5	761.332.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00				
Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	0	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.200.000,00	2	26.620.000,00	2	29.282.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00				
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	0	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.200.000,00	2	26.620.000,00	2	29.282.000,00				
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00				
Tertaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	605.000.000,00	2	665.500.000,00	2	732.050.000,00				
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	2		2		2		2		2					
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00				
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00	2	366.025.000,00				
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00				
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00	2	366.025.000,00				
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00				
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	3	5	5	400.000.000,00	5	440.000.000,00	5	484.000.000,00	5	532.400.000,00	5	585.640.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00				
Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)		2	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00	2	484.000.000,00	2	532.400.000,00	2	585.640.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2		2		2		2							
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00				KAB. LABUHANBATU SELATAN
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00		366.025.000,00				
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00				KAB. LABUHANBATU SELATAN
2.18.03.2.01.0003 - Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)		2	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	181.500.000,00	2	199.650.000,00	2	219.615.000,00				
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					261.609.158,00		287.770.074,00		316.547.081,00		348.201.789,00		383.021.968,00				
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	90	91	92	261.609.158,00	92	287.770.074,00	93	316.547.081,00	93	348.201.789,00	95	383.021.968,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					261.609.158,00		287.770.074,00		316.547.081,00		348.201.789,00		383.021.968,00				
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.000	250	250	261.609.158,00	250	287.770.074,00	250	316.547.081,00	250	348.201.789,00	250	383.021.968,00				
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1.000	250	250		250		250		250		250					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2					
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					13.500.000,00		14.850.000,00		16.335.000,00		17.968.500,00		19.765.350,00			KAB. LABUHANBATU SELATAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	13.500.000,00	2	14.850.000,00	2	16.335.000,00	2	17.968.500,00	2	19.765.350,00				
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					151.545.960,00		166.700.556,00		183.370.612,00		201.707.673,00		221.878.440,00			KAB. LABUHANBATU SELATAN	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.000	250	250	151.545.960,00	250	166.700.556,00	250	183.370.612,00	250	201.707.673,00	250	221.878.440,00				
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					96.563.198,00		106.219.518,00		116.841.469,00		128.525.616,00		141.378.178,00				
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1.000	250	250	96.563.198,00	250	106.219.518,00	250	116.841.469,00	250	128.525.616,00	250	141.378.178,00				
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					404.366.592,00		444.803.251,00		489.283.576,00		538.211.934,00		592.033.127,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	50	50	50	404.366.592,00	70	444.803.251,00	80	489.283.576,00	90	538.211.934,00	100	592.033.127,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					404.366.592,00		444.803.251,00		489.283.576,00		538.211.934,00		592.033.127,00			
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1.000	250	250	404.366.592,00	250	444.803.251,00	250	489.283.576,00	250	538.211.934,00	250	592.033.127,00	KAB. LABUHANBATU SELATAN		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1.000	250	250		250		250		250		250				
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	1.000	250	250		250		250		250		250				
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					154.367.646,00		169.804.411,00		186.784.852,00		205.463.337,00		226.009.671,00			
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	1.000	250	250	154.367.646,00	250	169.804.411,00	250	186.784.852,00	250	205.463.337,00	250	226.009.671,00			
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					157.632.354,00		173.395.589,00		190.735.148,00		209.808.663,00		230.789.529,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1.000	250	250	157.632.354,00	250	173.395.589,00	250	190.735.148,00	250	209.808.663,00	250	230.789.529,00			
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal					92.366.592,00		101.603.251,00		111.763.576,00		122.939.934,00		135.233.927,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan - serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1.000	250	250	92.366.592,00	250	101.603.251,00	250	111.763.576,00	250	122.939.934,00	250	135.233.927,00			
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					35.905.313,00		39.495.844,00		43.445.429,00		47.789.972,00		52.568.969,00			
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	50	50	50	35.905.313,00	70	39.495.844,00	80	43.445.429,00	90	47.789.972,00	100	52.568.969,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35.905.313,00		39.495.844,00		43.445.429,00		47.789.972,00		52.568.969,00			
Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	3	2	2	35.905.313,00	2	39.495.844,00	2	43.445.429,00	2	47.789.972,00	2	52.568.969,00			
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					35.905.313,00		39.495.844,00		43.445.429,00		47.789.972,00		52.568.969,00		KAB. LABUHANBA TU SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	3	2	2	35.905.313,00	2	39.495.844,00	2	43.445.429,00	2	47.789.972,00	2	52.568.969,00			

**Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
1.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

#### **4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama periode 2025–2029 difokuskan pada penguatan daya saing daerah, peningkatan efisiensi layanan publik, serta pengelolaan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan adaptif terhadap risiko. Seluruh arah kebijakan dituangkan secara terukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter utama dalam mengukur keberhasilan kinerja jangka menengah perangkat daerah.

IKU diposisikan sebagai instrumen kendali strategis untuk menjamin bahwa setiap program dan subkegiatan menghasilkan dampak nyata yang selaras dengan mandat kelembagaan, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan nasional. Indikator tersebut disusun berdasarkan prinsip relevansi, keterukuran, dan keterhubungan logis antara input, proses, output, hingga outcome. Adapun rincian target capaian IKU tahun 2025–2029 serta proyeksi tahun 2030 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Jumlah Investasi	triliun rupiah	3.447.288.045.792	1.016.518.000.000	1.067.343.900.000	1.120.711.095.000	1.176.746.649.750	1.235.583.982.238	1.297.363.181.349	
3.	Investor berskala nasional	Investor	83	90	96	101	106	110	115	

#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)**

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan (outcome) atas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Penetapan IKK mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. IKK juga menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan serta sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan perencanaan di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

**Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investor berskala nasional	Investor	90	96	101	106	110	115	Indikator Program PD
2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	5	5	5	5	5	5	Indikator Program PD
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	5	5	5	5	5	5	Indikator Program PD
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	50	50	70	80	90	100	Indikator Program PD
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	91	92	92	93	93	95	Indikator Program PD
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	50	50	70	80	90	100	Indikator Program PD



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi arah kebijakan strategis guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, investasi yang berdaya saing, serta birokrasi yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, penyusunan dokumen ini mempertimbangkan analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, agar mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penyelenggaraan pelayanan dan penanaman modal. Implementasi Renstra ini menuntut komitmen seluruh jajaran DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam bentuk perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, regional, nasional, maupun mitra strategis lainnya.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra ini dapat disesuaikan dengan perubahan regulasi, kebijakan pemerintah pusat, maupun kondisi aktual yang berkembang selama periode perencanaannya. Evaluasi berkala melalui sistem monitoring dan pengukuran kinerja akan menjadi instrumen penting dalam memastikan ketercapaian target dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Sosopan, 14 Oktober 2025  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan



**ASMAMU HARAHAP, SKM, MM**  
**PEMBINA (IV/a)**  
**NIP. 19791120 200801 2 002**